

BAB II

Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

A. Sejarah BPPM

BPPM dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance) melalui peningkatan kemandirian perempuan dan masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 tahun 2008 mengenai Pembentukan dan Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka dibentuk “Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM)” yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat. Sebelumnya BPPM merupakan bentukan dari Kantor Pemberdayaan Perempuan (KPP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 2 Tahun 2004.

B. Visi dan Misi BPPM

Visi

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih dalam RPJMD adalah “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja” Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban yang berarti pembangunan di DIY terus diupayakan untuk berkelanjutan dan memiliki pendekatan pembangunan yang berpusat pada kesejahteraan manusia Jogja baik lahir maupun batin. Kesejahteraan ekonomi adalah kesejahteraan fisik yang harus dapat dinikmati oleh pelaku utama yaitu manusianya, sehingga kesejahteraan fisik itu harus diikuti oleh kesejahteraan yang lebih riil yang diterima oleh manusia yang terlibat dalam pembangunan. Manusia Jogja masih memiliki persoalan kesejahteraan dari aspek kemiskinan, ketimpangan antar kelompok pendapatan, dan tingginya angka ketergantungan sebaran pendapatan oleh angkatan kerja, mengingat angka ketergantungan yang cukup tinggi di DIY.

Misi

Untuk mencapai visi yang telah dibentuk, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat Yang berkeadilan dan Berkeadaban.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke satu yaitu meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban. Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya, dengan sasaran meningkatnya Derajat Kualitas hidup sosial masyarakat.

Moto

Moto yang dimiliki Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat adalah “SETARA” yang berarti Semangat, Tangguh, Sejahtera.

C. Kegiatan BPPM

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat memiliki 12 Program Kegiatan Tahunan. Dari 12 Program kegiatan yang dilakukan oleh BPPM, peneliti mengambil 2 program kegiatan yang kemudian akan dilihat bagaimana penerapan komunikasi pemberdayaan di tiap kegiatan-kegiatan tersebut. Diantaranya yaitu :

1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Dalam program ini terdapat dua kegiatan yang peneliti pilih untuk diteliti. Kegiatan pertama ada Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri). Untuk kegiatan yang kedua adalah kegiatan politik perempuan.

2. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Pada program ini terdapat kegiatan perlindungan perempuan yang terdiri dari tiga tahapan yaitu pencegahan, penanganan, pasca pendampingan.

D. Struktur dan Personil BPPM

1. Struktur BPPM Yogyakarta

Nama	Jabatan
dr. RA ARIDA OETAMI , M.Kes.	Kepala Badan
Dra. CAROLINA RIDIASTUTY, MM	Sekretaris Badan
TRI SUSILASTUTI, AKS.	Kepala Subbagian Program, Data, dan Teknologi Informasi
ENDAR SRIWINARSIH, SH	Kepala Subbagian Umum
SUNARYATI, S.E	Kepala Subbagian Keuangan
drg. RETNO NUMARATI, M. Kes	Kepala Bidang Keluarga Berencana (KB)
A. HERU TRIYONO, SKM	Kepala Subbidang Pemberdayaan dan Advokasi (PA)
ISNAIN AMINUDIN, S.Sos.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM)
SUWARTO, S.Sos.	Kepala Subbidang Penguatan Kelembagaan (PK)
SOLEH ANWARI, S.ST	Kepala Subbidang Penguatan Potensi Masyarakat (PPM)
NELLY TRISTIANA, S.Kep, Ners	Kepala Bidang Pengembangan Partisipasi Perempuan (PPP)
TITI S. MALAH, SE	Kepala Subbidang Pengarus Utamaan Gender (PUG)
Dra. ENDAH WAHYUNI	Kepala Subbidang Pengembangan Kelembagaan Organisasi Perempuan (PKOP)
Dra. WREDI WYANDANI	Kepala Bidang Perlindungan Hak- hak Perempuan (PHP)
Dra. Y. SANTI ROESTRIYANI	Kepala Subbidang Data dan Informasi Gender dan Anak (DIGA)

drg. SUPARTINAH	Kepala Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (KHPP)
-----------------	---

Tabel 5

2. Struktur Bidang PPP

Kepala Bidang : Nelly Tristiana S.Kep. Ners

Sub Bidang PUG

Kepala Sub Bidang : Titik Sufijayanti Malah S.E

Staff : - Rumanti
- Susanto
- Sarbaniati
- Naresthi Primasari

Sub Bidang PKOP

Kepala Sub Bidang : Dra. Endah Wahyuni

Staff : - Suroyo S.H
- Heni Siti Wahyuni S.sos
- Ani Nur Sayyidah S.sos

3. Struktur Bidang PHP

Kepala Bidang : Dra. Wredi Wyandini

Sub Bidang KHPP

Kepala Sub Bidang : -

Staff : - Rahayu Sri Lestari S.pd
- Kristian
- Poniran
- Ika Wijayanti

Sub Bidang DIGA

Kepala Sub Bidang : Dra Y. Santi Roestriyani

Staff : Arif Nasiruddin